

# **DETERMINAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**DWI KUSUMAWATI**  
**NIM. 12030114183001**

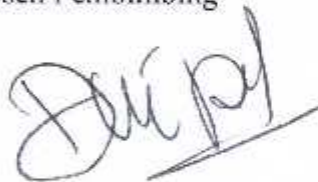
**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
**SEMARANG**  
**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dwi Kusumawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183001  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **DETERMINAN OPINI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI  
INDONESIA**  
Dosen Pembimbing : Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 5 Desember 2016

Dosen Pembimbing



(Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.)

NIP. 198010012008011014

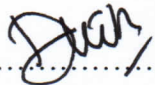
## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Dwi Kusumawati  
Nomor Induk Mahasiswa : 12030114183001  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi  
Judul Skripsi : **DETERMINAN OPINI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI  
INDONESIA**

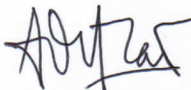
**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 12 Desember 2016**

Tim Penguji :

1. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt.

()

2. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt.

()

3. Andrian Budi Prasetyo, S.E., M.Si., Akt.

()

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Dwi Kusumawati, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **DETERMINAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Desember 2016

Yang membuat pernyataan,

Dwi Kusumawati

NIM. 12030114183001

*The teacher who is indeed wise  
does not bid you to enter the house of his wisdom  
but rather leads you  
to the threshold of your mind*

**-Kahlil Gibran-**

*Skripsi ini dipersembahkan untuk keluarga dan  
Bangsa Indonesia tercinta*

## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the determinant factors that affect the opinion of the financial statement of the local government. The dependent variable in this research is audit opinion from the Audit Board of Republic of Indonesia on the financial statement of the local government. The independent variables were tested in this research is weakness of the internal control, non-compliance with laws and regulations, the age of local government, size of local government, the dependance level, human resource quality, follow-up of audit recommendation, the type of local government and the forms of local government.*

*This research uses secondary data devided from the results of the examination report the Audit Board on the local goverment financial report period in 2015. The total sample as many as 497 local government in Indonesia. The analytical method used is ordinal logistic regression or ordered logistic regression.*

*The results showed that the weakness of internal control and the dependance level have significant negative effect on opinion of the financial statement of the local government. The follow-up of audit recommendation have significant positive effect on opinion of the financial statement of the local government. non-compliance with laws and regulations, the age of local government, size of local government, human resource quality, the type of local government and the forms of local government does not have a significant effect on opinion of the financial statement of the local government.*

*Keywords: audit opinion, weakness of the internal control, non-compliance with laws and regulations, the age of local government, size of local government, the dependance level, human resource quality, follow-up of audit recommendation, the type of local government and the forms of local government*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu (determinan) yang berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Variabel bebas yang diuji dalam penelitian ini adalah kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu, tipe pemerintah daerah dan status pemerintah daerah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015. Sampel penelitian sebanyak 497 pemerintah daerah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik ordinal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu berpengaruh positif signifikan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, tipe pemerintah daerah dan status pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: opini BPK, kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah, kualitas sumber daya manusia, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu, tipe pemerintah daerah, status pemerintah daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**DETERMINAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Andrie Samtriawan Firmana, Ibu Mumu Kurniawati dan Bapak Sudjarno, atas semua doa restu dan kasih sayang kepada penulis, serta kaka Nakisha Magaski dan akang Rakeyan Panaya yang selalu menjadi semangat dan inspirasi kepada penulis;
2. BPK RI yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk meningkatkan kemampuan dan gelar akademis di Universitas Diponegoro.
3. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;



4. Fuad, S.E.T., M.Si., Akt., Ph.D, selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro;
5. Dr. Dwi Ratmono, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan masukan, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali;
7. Seluruh staf pengajar di FEB Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses perkuliahan;
8. Sahabat-sahabat tugas belajar Undip Tahun 2014 yang selalu menjadi keluarga yang membantu dan menemani serta memberikan pengalaman baru kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Diponegoro;
9. Pipit Siti Jenar, La Ode dan Lambok Maranatal yang telah menjadi sahabat yang selalu berjalan bersama dalam menjalani hari-hari yang luar biasa;
10. Seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung sampai penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan semua pihak yang menggunakannya.

Semarang, Desember 2016  
Penulis,

Dwi Kusumawati  
NIM. 12030114183001

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	12
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	12
2.1.1 Teori Agensi.....	12
2.1.2 Opini Audit.....	14
2.1.3 Sistem Pengendalian Intern.....	16
2.1.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan .....	17
2.1.5 Penelitian Terdahulu .....	19
2.2 Kerangka Pemikiran.....	21
2.3 Pengembangan Hipotesis .....	24
2.3.1 Pengaruh Kelemahan SPI terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	24
2.3.2 Pengaruh Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	25
2.3.3 Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	27

2.3.4	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	28
2.3.5	Pengaruh Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	29
2.3.6	Pengaruh Kualitas SDM terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
2.3.7	Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terdahulu terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	31
2.3.8	Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	32
2.3.9	Pengaruh Status Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....		35
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	35
3.1.1	Variabel Terikat (Dependen) .....	35
3.1.2	Variabel Bebas (Independen).....	36
3.1.2.1	Kelemahan SPI (KSPI) .....	37
3.1.2.2	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (KPT).....	37
3.1.2.3	Umur Pemerintah Daerah (UPD).....	38
3.1.2.4	Ukuran Pemerintah Daerah (UKPD) .....	38
3.1.2.5	Ketergantungan Pemerintah Daerah (KPD).....	39
3.1.2.6	Kualitas SDM (KSDM) .....	40
3.1.2.7	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan terdahulu (TLRHP) .....	40
3.1.2.8	Tipe Pemerintah Daerah (TPD) .....	41
3.1.2.9	Status Pemerintah Daerah (SPD) .....	41
3.2	Populasi dan Sampel .....	42
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	42
3.4	Metode Pengumpulan Data .....	43
3.5	Metode Analisis .....	44
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	45
3.5.2	Uji Multikolinearitas .....	46
3.5.3	Analisis Regresi Logistik Ordinal.....	46
3.5.3.1	Uji <i>Likelihood L</i> .....	46
3.5.3.2	Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	47
3.5.3.3	Uji <i>Nagelkerke R Square</i> .....	47
3.5.3.4	Uji <i>Parallel Lines</i> .....	47

3.5.3.5	Uji <i>Parameter Estimates</i> .....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	49
4.2	Analisis Data .....	50
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif .....	50
4.2.2	Uji Multikolinearitas .....	60
4.2.3	Analisis Regresi Logistik Ordinal.....	60
4.2.3.1	Uji <i>Likelihood L (Model Fitting Information)</i> .....	61
4.2.3.2	Uji <i>Goodness of Fit</i> .....	62
4.2.3.3	Uji <i>Nagelkerke R-Square</i> .....	62
4.2.3.4	Uji Estimasi Parameter ( <i>Test of Parameter Estimate</i> ) .....	63
4.2.3.5	Uji <i>Parallel Lines</i> .....	66
4.2.4	Hasil Pengujian Hipotesis .....	67
4.3	Interpretasi Hasil .....	70
4.3.1	Pengaruh Kelemahan SPI terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	70
4.3.2	Pengaruh Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	72
4.3.3	Pengaruh Umur Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	73
4.3.4	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	74
4.3.5	Pengaruh Ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	75
4.3.6	Pengaruh Kualitas SDM terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	76
4.3.7	Pengaruh Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Terdahulu terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	77
4.3.8	Pengaruh Tipe Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	78
4.3.9	Pengaruh Status Pemerintah Daerah terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .....	79
BAB V PENUTUP.....		81
5.1	Simpulan.....	81
5.2	Keterbatasan .....	83
5.3	Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....		85

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	87
------------------------	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 3.1	Peringkat Opini .....	36
Tabel 3.2	Ringkasan Sumber Data.....	43
Tabel 4.1	Pengambilan Sampel Penelitian.....	49
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif .....	51
Tabel 4.3	Tabel Frekuensi Opini .....	54
Tabel 4.4	Tabel Frekuensi Tipe Pemerintah Daerah.....	54
Tabel 4.5	Tabel Frekuensi Status Pemerintah Daerah .....	55
Tabel 4.6	Tabel <i>Crosstab</i> TPD dengan Opini.....	56
Tabel 4.7	Tabel <i>Crosstab</i> SPD dengan Opini .....	58
Tabel 4.8	Analisis Korelasi Pearson .....	60
Tabel 4.9	Uji <i>Likelihood L (Model Fitting Information)</i> .....	61
Tabel 4.10	Uji <i>Goodness-of-Fit</i> .....	62
Tabel 4.11	Uji <i>Nagelkerke R-Square</i> .....	63
Tabel 4.12	Tabel Estimasi Parameter.....	64
Tabel 4.13	Uji <i>Paralell Lines</i> .....	67
Tabel 4.14	Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015.....	4
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .....	23



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Hasil Uji Statistik.....	87
Lampiran B	Tabulasi Data Penelitian .....	92

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1. Pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Masing-masing pemerintah daerah mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat yang merupakan salah satu tugas dari pemerintah seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri untuk menyejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah akan lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerahnya dari pada pemerintah pusat yang kemungkinan tidak optimal dalam mengurus dan melayani seluruh urusan masyarakat di daerah karena cakupannya yang terlalu luas. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan mampu mengembangkan dan mempertahankan potensi dan kekhasan yang beragam di setiap daerah. Menurut Mardiasmo (dalam Barlian, 2015), berbagai

tuntutan atas otonomi daerah seharusnya dapat memberikan dorongan kepada pemerintah untuk mewujudkan otonomi daerah secara optimal agar dapat menguatkan ekonomi daerah dalam rangka memperkokoh ekonomi nasional dalam menghadapi era globalisasi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dilakukan penataan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah. Penataan daerah salah satunya berupa pembentukan daerah. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran daerah kabupaten/kota dan penggabungan daerah kabupaten/kota. Pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah kabupaten/kota menjadi 2 atau lebih daerah baru. Daerah induk merupakan daerah kabupaten/kota asal yang akan dipecah, sedangkan daerah pemekaran adalah daerah baru yang dibentuk dari daerah induk. Pembentukan daerah selanjutnya diatur dalam undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini akan dievaluasi oleh pemerintah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) yang dilakukan oleh pemerintah meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD) dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB). Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan

dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Salah satu sumber informasi dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) ini adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Kewajiban menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dijelaskan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kewajiban penyusunan laporan keuangan pemerintah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun, kemudian disampaikan kepada BPK.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK dilakukan dalam rangka menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan ini berupa laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini. Berdasarkan petunjuk teknis pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah

daerah Tahun 2007, opini terhadap kewajaran atas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Wajar tanpa pengecualian (WTP), Wajar dengan pengecualian (WDP), Tidak wajar (TW) dan tidak dapat menyatakan pendapat (TMP). Namun dalam prakteknya, BPK menambahkan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP DPP) dalam memberikan opini.

Pada semester I tahun 2016, BPK memeriksa 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015 dari 542 pemerintah daerah. Terdapat 9 Pemerintah Daerah yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut meliputi 34 laporan keuangan pemerintah provinsi, 408 laporan keuangan pemerintah kabupaten dan 91 laporan keuangan pemerintah kota. Di antaranya terdapat 3 laporan keuangan pemerintah daerah dari daerah pemekaran yang baru pertama kali disusun. Opini laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

**Gambar 1.1**  
**Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2015**



Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016 BPK

Dari Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP sebanyak 58%, opini WDP sebanyak 35%, opini TW sebanyak 1% dan opini TMP sebanyak 6%. Hal ini tidak sesuai dengan target RPJMN 2010-2014 yang menetapkan opini WTP atas seluruh laporan keuangan pemerintah daerah pada Tahun 2014. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi perolehan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Opini atas hasil pemeriksaan laporan keuangan ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Penelitian yang berkaitan dengan perolehan opini audit dalam kaitannya dengan tipe pemerintah kabupaten atau kota dan status pemerintah daerah sebagai daerah induk atau daerah pemekaran dilakukan oleh Husnatarina dan Halim (2013) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara perolehan opini audit pemerintah kabupaten dan kota serta antara daerah induk dan daerah pemekaran, opini audit pemerintah kota lebih baik dari pemerintah kabupaten dan opini audit daerah induk lebih baik dari daerah pemekaran. Penelitian mengenai opini atas laporan keuangan pemerintah daerah juga dilakukan oleh Kawedar (2009) yang menyimpulkan bahwa peningkatan kelemahan SPI merupakan salah satu penyebab suatu pemerintah daerah mengalami penurunan opini.

Fatimah, *et al.* (2014) menyebutkan secara rinci bahwa kelemahan SPI dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan kasus kerugian daerah dan

penyimpangan administrasi, dan opini tahun sebelumnya yang berpengaruh terhadap penerimaan opini WTP. Nalurita (2015) menambahkan bahwa kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, ketergantungan pemerintah daerah dan opini tahun sebelumnya berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah yang diwakili opini BPK, sedangkan ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh. Lebih lanjut Akbar, *et al.* (2016) menggunakan nilai rekomendasi, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, aset, belanja hibah dalam penelitiannya dan menyimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakannya berpengaruh terhadap probabilitas pemerintah daerah memperoleh opini WTP.

Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan adanya ketidakkonsistensian hasil penelitian sebelumnya dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, sehingga membutuhkan pembuktian lebih lanjut mengenai opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut yang menjadi motivasi untuk melakukan penelitian untuk menganalisis faktor penentu (determinan) opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka judul dalam penelitian ini adalah **“Determinan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka dilaksanakan otonomi yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan mampu mengembangkan dan mempertahankan potensi dan kekhasan yang beragam dari tiap daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini akan dievaluasi oleh pemerintah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.

Salah satu sumber informasi dalam penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) ini adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut disusun dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam rangka menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Hasil pemeriksaan ini berupa laporan hasil pemeriksaan yang memuat opini. Target RPJMN 2010-2014 adalah seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2014 memperoleh opini WTP. Namun, yang terjadi di lapangan dari data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2016 hanya sebanyak 58% Pemerintah daerah yang memperoleh WTP. Target opini WTP belum terpenuhi menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya baik. Oleh karena itu, untuk perbaikan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor yang mempengaruhi opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



1. Apakah kelemahan SPI berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
6. Apakah kualitas SDM berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
7. Apakah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
8. Apakah tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?
9. Apakah status pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa kelemahan SPI berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa umur pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
6. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

7. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terdahulu berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
8. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa tipe pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
9. Untuk memperoleh bukti dan analisis bahwa status pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Memberikan tambahan bukti pada literatur akuntansi mengenai faktor penentu (determinan) opini atas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Husnatarina dan Halim (2013) adalah penambahan variabel kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, umur pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, ketergantungan pemerintah daerah, kualitas SDM dan tindak lanjut rekomendasi hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini.
2. Membantu pemerintah daerah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan yang disusun. Hal ini dilakukan dengan cara memperhatikan dan meningkatkan kinerja dalam hal yang berhubungan dengan variabel

independen yang berpengaruh signifikan terhadap opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Memberikan kontribusi pada penelitian berikutnya.

#### **1.4. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini terdiri atas lima bab. Sistematika penulisannya sebagai berikut.

##### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

##### **BAB II          TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan hipotesis-hipotesis terkait dengan penelitian ini.

##### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian, populasi, sampel, sumber data, dan metode pengumpulan data.

##### **BAB IV        HASIL DAN ANALISIS**

Pada bab ini berisi tentang interpretasi olah data, analisis yang digunakan, dan objek penelitian.

##### **BAB V         PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.